



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

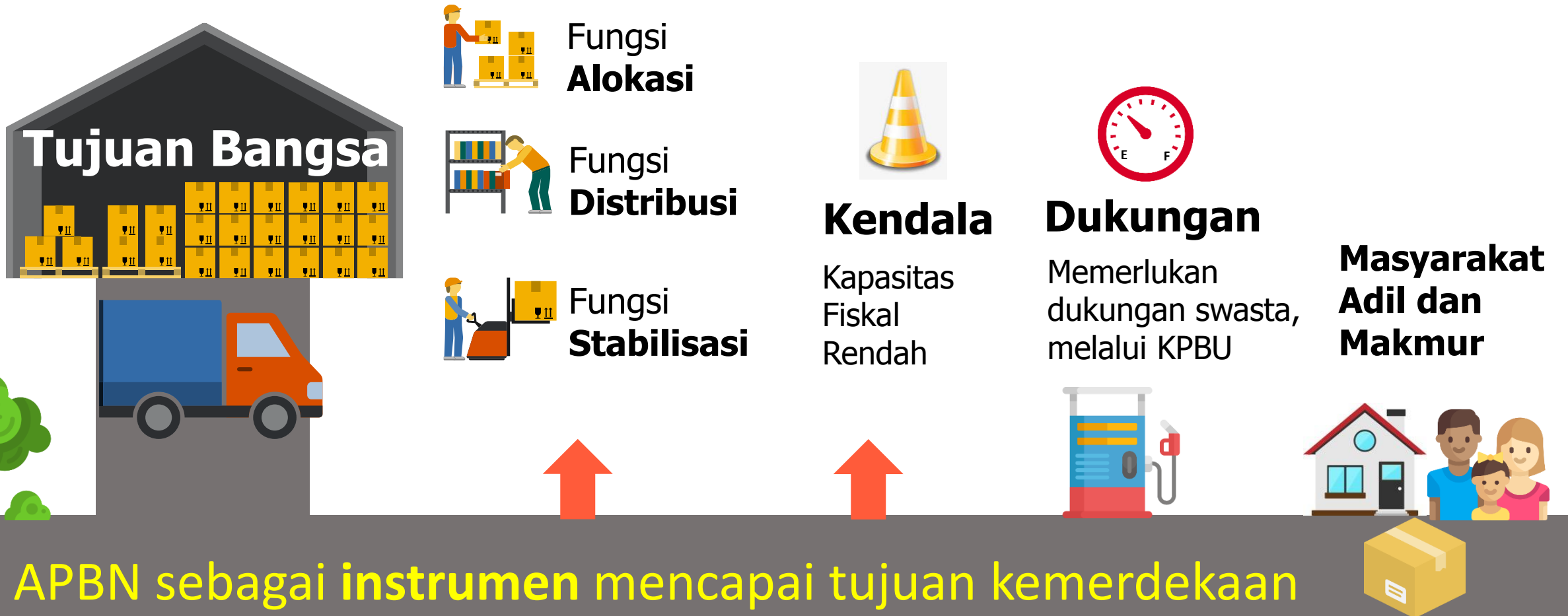
Revisi UU Migas Untuk Optimalisasi APBN dan Solusi Permasalahan Pokok Sektor Migas

DISAMPAIKAN PADA FGD RUU MIGAS – MEDIA INDONESIA
MARET 2019

Sekilas APBN

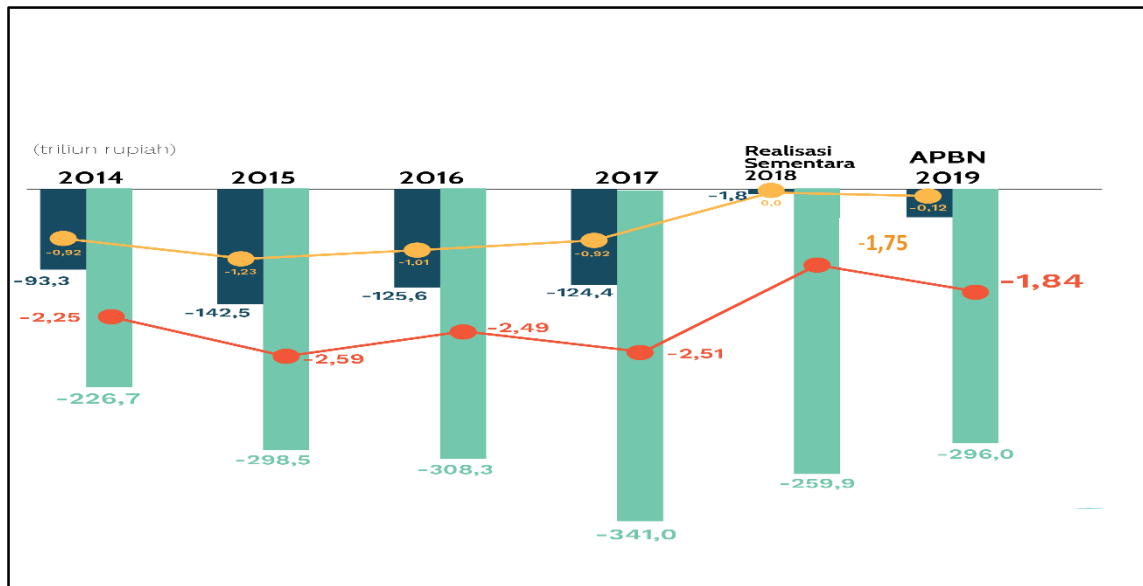


APBN untuk mewujudkan Masyarakat Adil dan Makmur

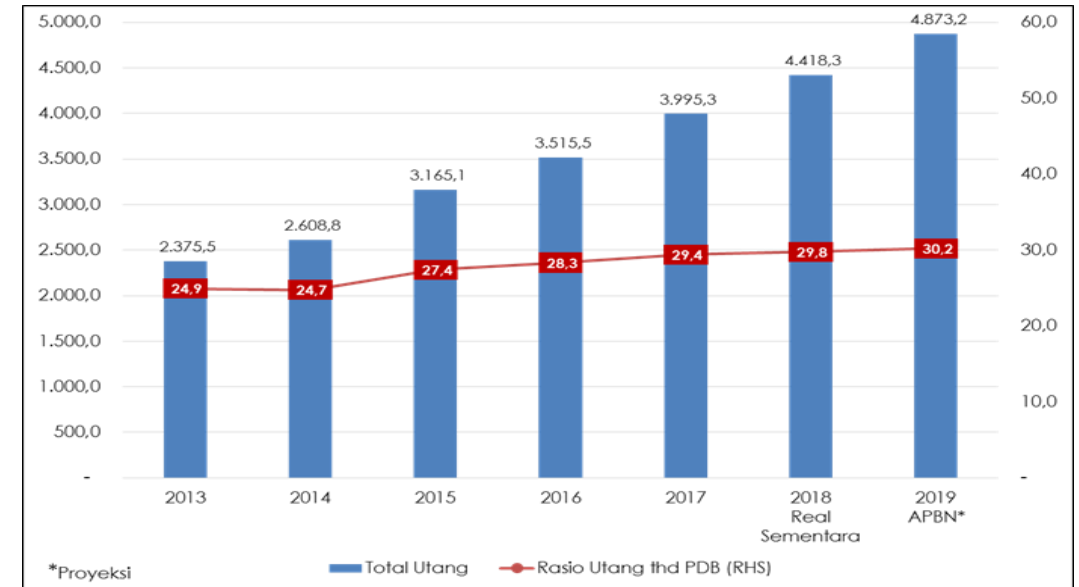


Fiscal Rule selalu menjadi acuan dalam penyusunan APBN

- 1 Defisit Anggaran** Maksimal **3%** dari PDB (Konsolidasi APBN dan APBD)



- 2 Outstanding Utang** Maksimal **60%** dari PDB



Asumsi Makro 2019 disesuaikan untuk mengantisipasi kondisi global

APBN menjadi lebih realistis dan kredibel

Asumsi Dasar ekonomi
Makro

		Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	APBN 2019
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,9	5,0	5,1	5,17	5,3
	Inflasi (% yoy)	3,4	3,0	3,6	3,13	3,5
	Nilai Tukar (Rp/USD)	13.392	13.307	13.384	14.247	15.000
	Suku Bunga SPN (%)	6,0	5,7	5,0	4,95	5,3
	Harga Minyak (US\$/barrel)	49	40	51	67,5	70
	Lifting Minyak (ribu barrel/hari)	778	829	804	776	775
	Lifting Gas (ribu barrel/hari)	1.195	1.180	1.142	1.136	1.250
	Cost Recovery (miliar USD)	13,7	11,6	10,7	11,3	10,22

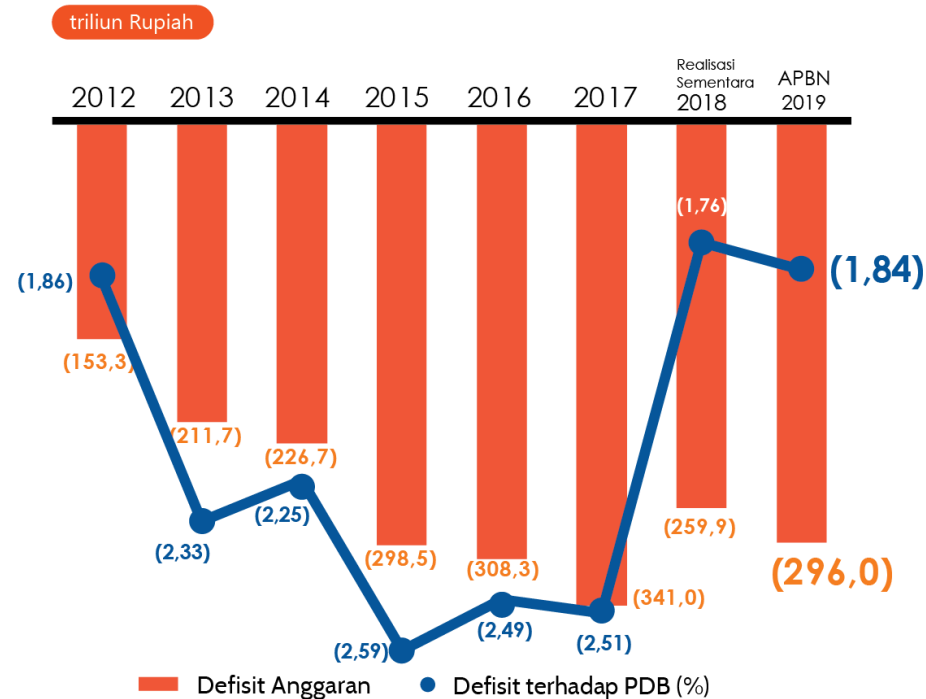
Postur APBN 2019 → defisit anggaran 1,84% thd PDB

Uraian (triliun Rupiah)	2018		2019
	Realisasi Sementara	% thd APBN	APBN
A. PENDAPATAN NEGARA	1.942,3	102,5	2.165,1
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.928,4	101,8	2.164,7
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.521,4	94,0	1.786,4
<i>Tax Ratio (%)</i>	<i>11,42</i>		<i>12,22</i>
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	407,1	147,8	378,3
II. PENERIMAAN HIBAH	13,9	1.161,4	0,4
B. BELANJA NEGARA	2.202,2	99,2	2.461,1
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.444,4	99,3	1.634,3
1. Belanja K/L	836,2	98,7	855,4
2. Belanja Non K/L	608,2	100,2	778,9
a.l. a. Pembayaran Bunga Utang	258,1	108,2	275,9
b. Subsidi Energi	153,5	162,4	160,0
1) Subsidi BBM & LPG	97,0	207,0	100,6
2) Subsidi Listrik	56,5	118,6	59,3
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	757,8	98,9	826,8
1. Transfer ke Daerah	697,9	98,8	756,8
a.l. a. Dana Bagi Hasil	93,7	105,0	106,4
b. Dana Alokasi Umum	401,5	100,0	417,9
c. Dana Alokasi Khusus Fisik	58,1	93,1	69,3
2. Dana Desa	59,9	99,8	70,0
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(1,8)	2,1	(20,1)
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(259,9)	79,7	(296,0)
<i>% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB</i>	<i>(1,75)</i>		<i>(1,84)</i>
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	300,4	92,2	296,0
a.l. PEMBIAYAAN UTANG	366,7	91,8	359,3
a.l. Surat Berharga Negara (neto)	358,4	86,5	389,0
KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN	40,5		(0,0)

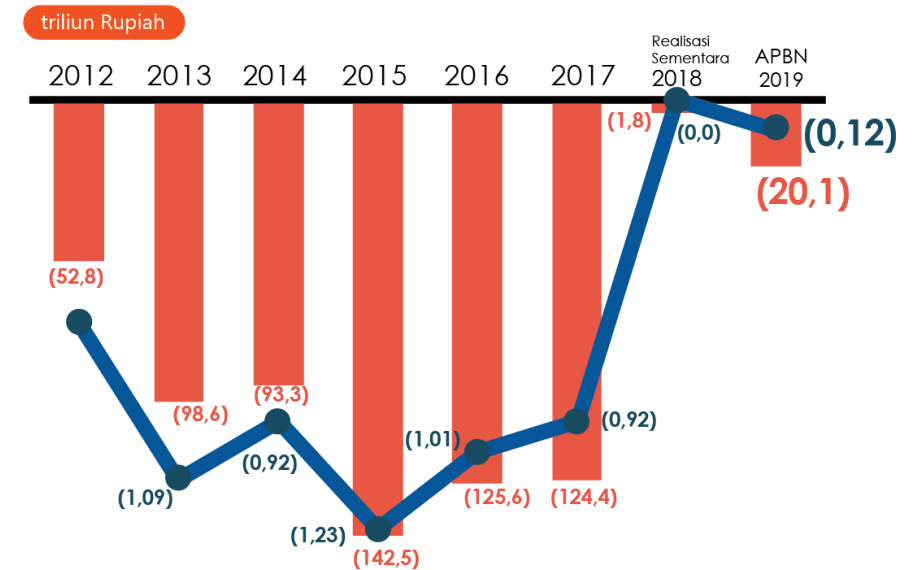
Realisasi sementara 2018 menggunakan data yang dilaporkan ke Presiden tanggal 2 Januari 2019, kecuali PDB nominal sesuai realisasi 2018

APBN Sehat

Defisit semakin turun dan Keseimbangan Primer menuju arah positif sehingga APBN menjadi sustainable dan prudent



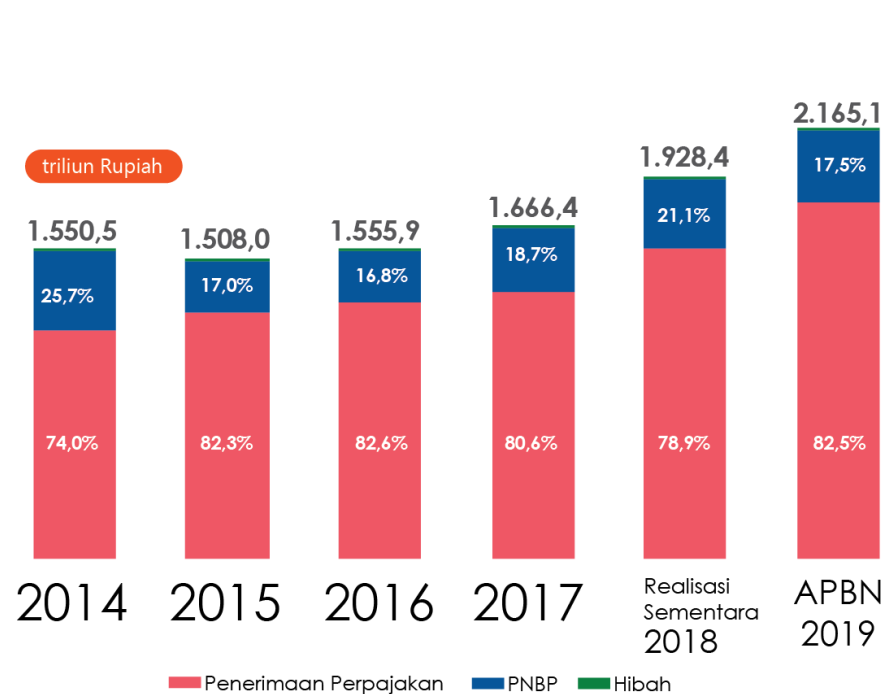
Rasio Defisit APBN diturunkan menjadi **1,84% PDB**, terendah sejak tahun 2013



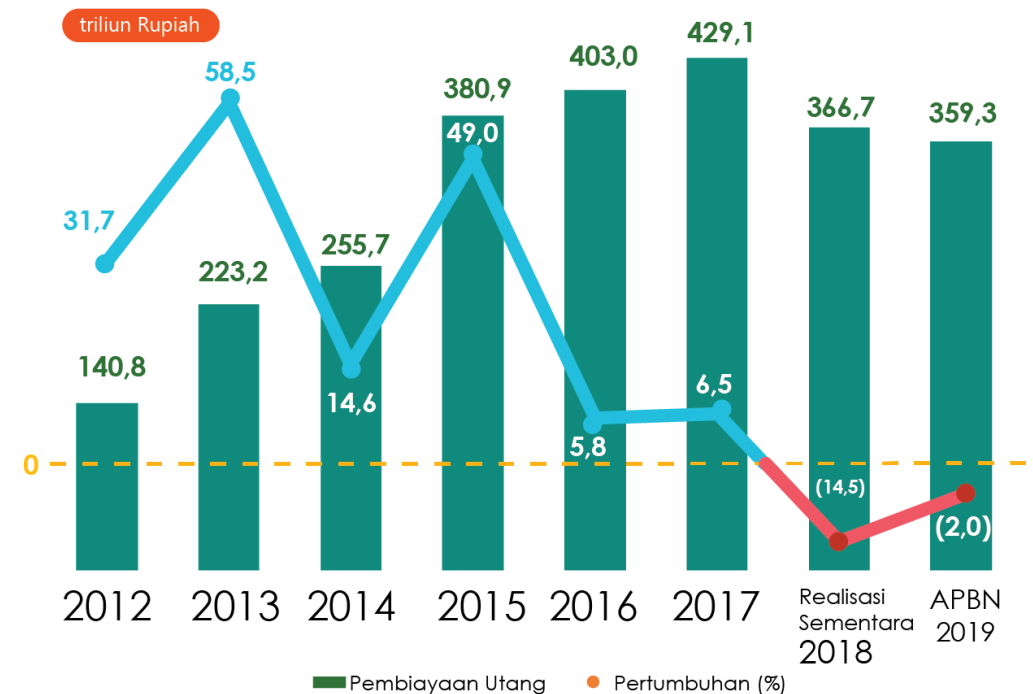
Keseimbangan Primer **mendekati Rp0** --> konsisten turun sejak 2015

APBN Mandiri

Ditunjukkan dengan penerimaan pajak menjadi sumber utama belanja negara dan tumbuh lebih realistis



Kontribusi perpajakan terus meningkat menjadi **82,5%** (2014: 74,0%)



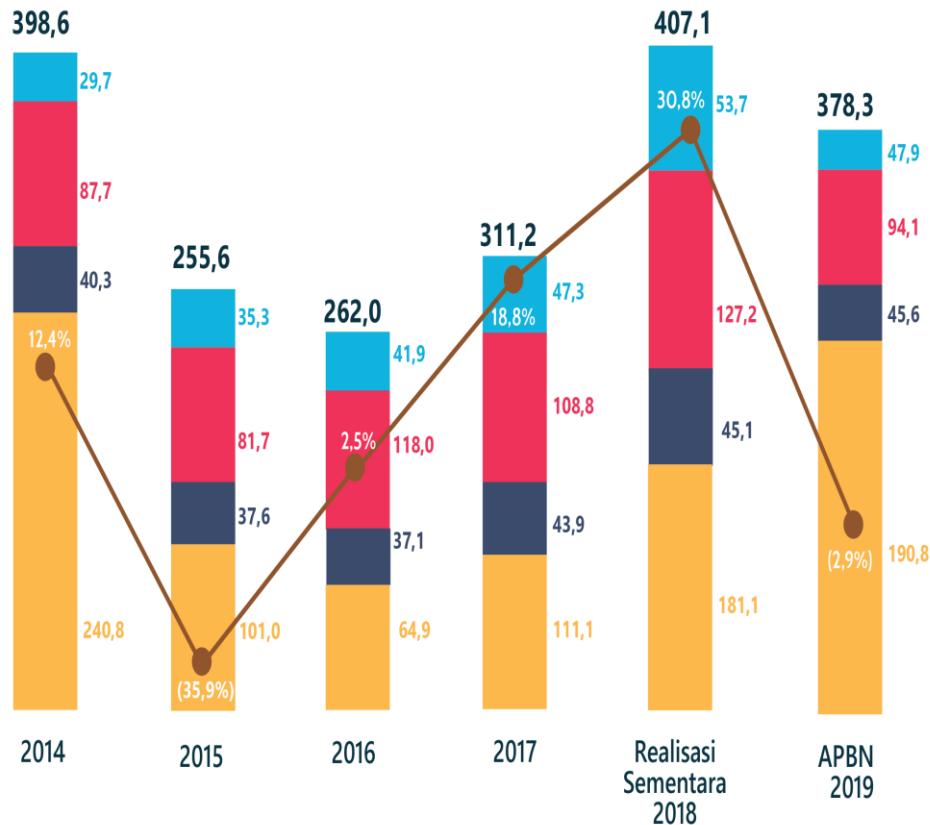
Pembiayaan utang semakin **menurun**

PNBP

Rp378,3 T

PNBP, 2014-2019

(triliun rupiah)



PNBP 2019 ditopang oleh kenaikan harga minyak, peningkatan kualitas dan volume layanan, serta perbaikan tata kelola

Kebijakan PNBP



Optimalisasi produksi

diikuti **efisiensi biaya** dan pengembangan industri hilir, kelestarian lingkungan dan keberlangsungan usaha



Peningkatan pelayanan dan penyesuaian tarif

mempertimbangkan daya beli dan pengembangan dunia usaha serta **optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)**



Peningkatan dividen BUMN

mempertimbangkan **cashflow** dan kemampuan keuangan BUMN, serta memperkuat pengembangan usaha dan menjalankan penugasan Pemerintah



Penggunaan Teknologi Terintegrasi/Terkoneksi

dengan sistem pembayaran PNBP

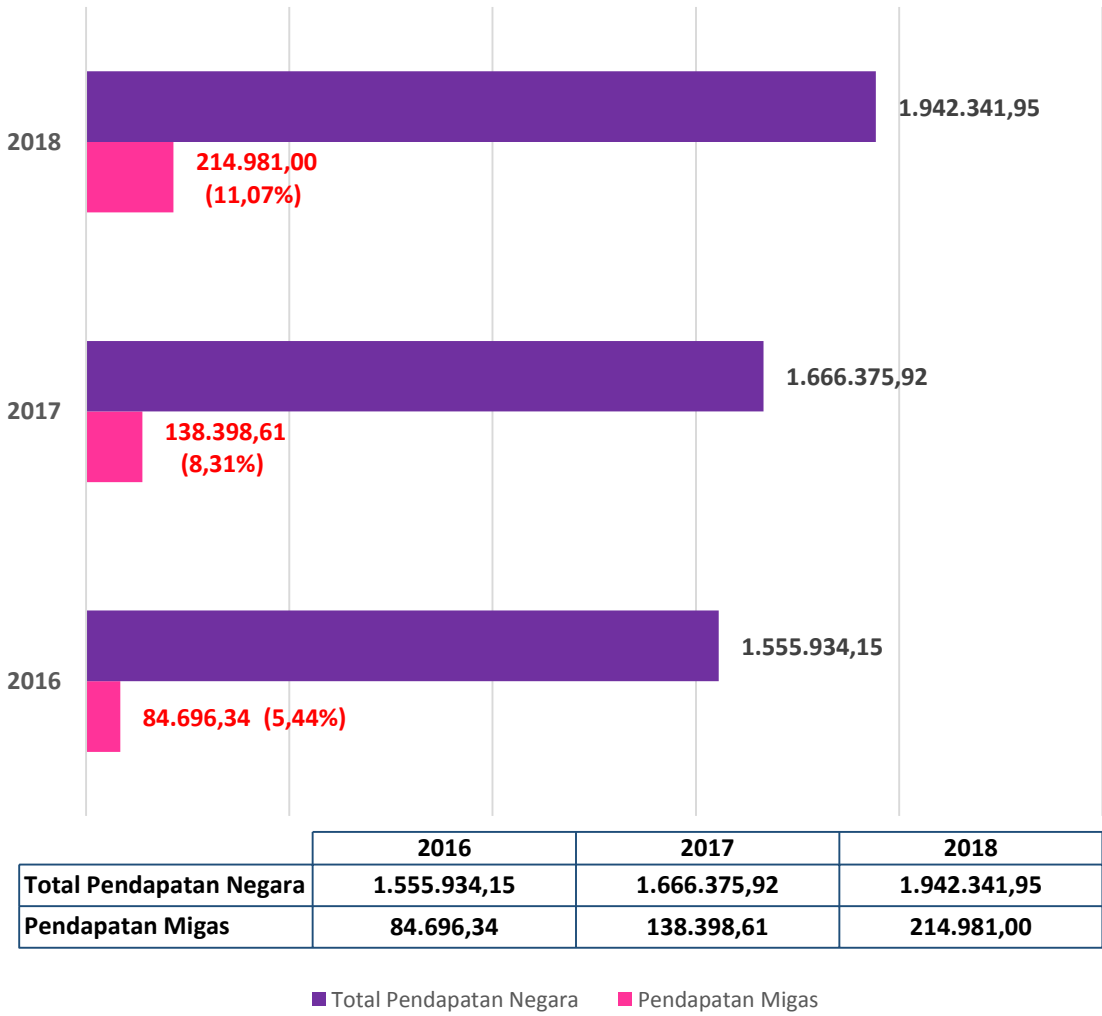


Tindak Lanjut Perubahan UU PNBP

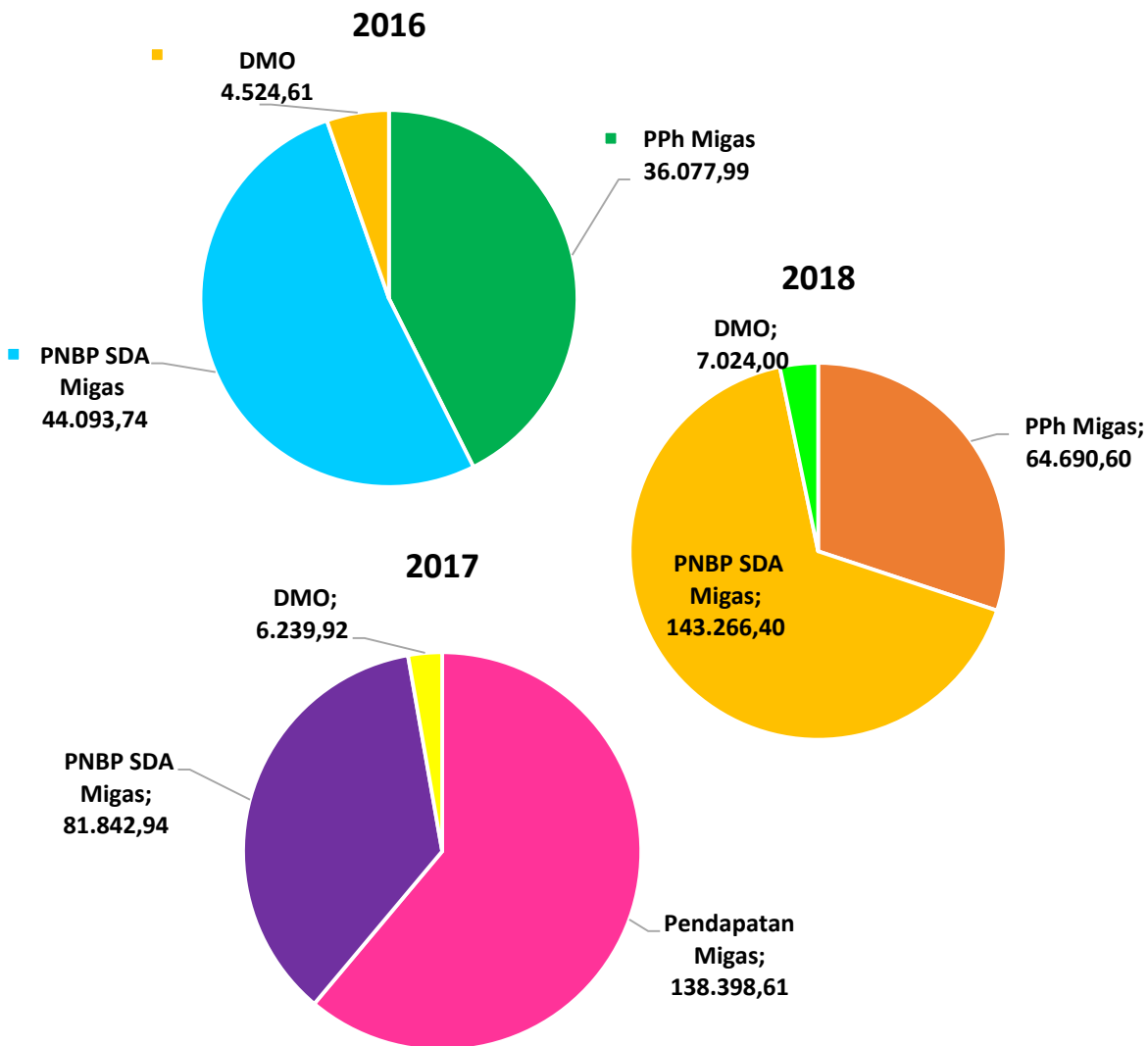
KONTRIBUSI PENDAPATAN MIGAS MASIH BELUM SIGNIFIKAN DALAM APBN

Pendapatan Migas dalam 3 tahun terakhir mengalami kenaikan, namun kontribusi terhadap APBN masih belum signifikan hanya 11,07% pada tahun 2018. Kenaikan penerimaan migas utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah.

PROPORSI PENDAPATAN MIGAS TERHADAP TOTAL PENDAPATAN NEGARA (MILAR RP)



KOMPOSISI PENDAPATAN MIGAS (MILIAR RP)

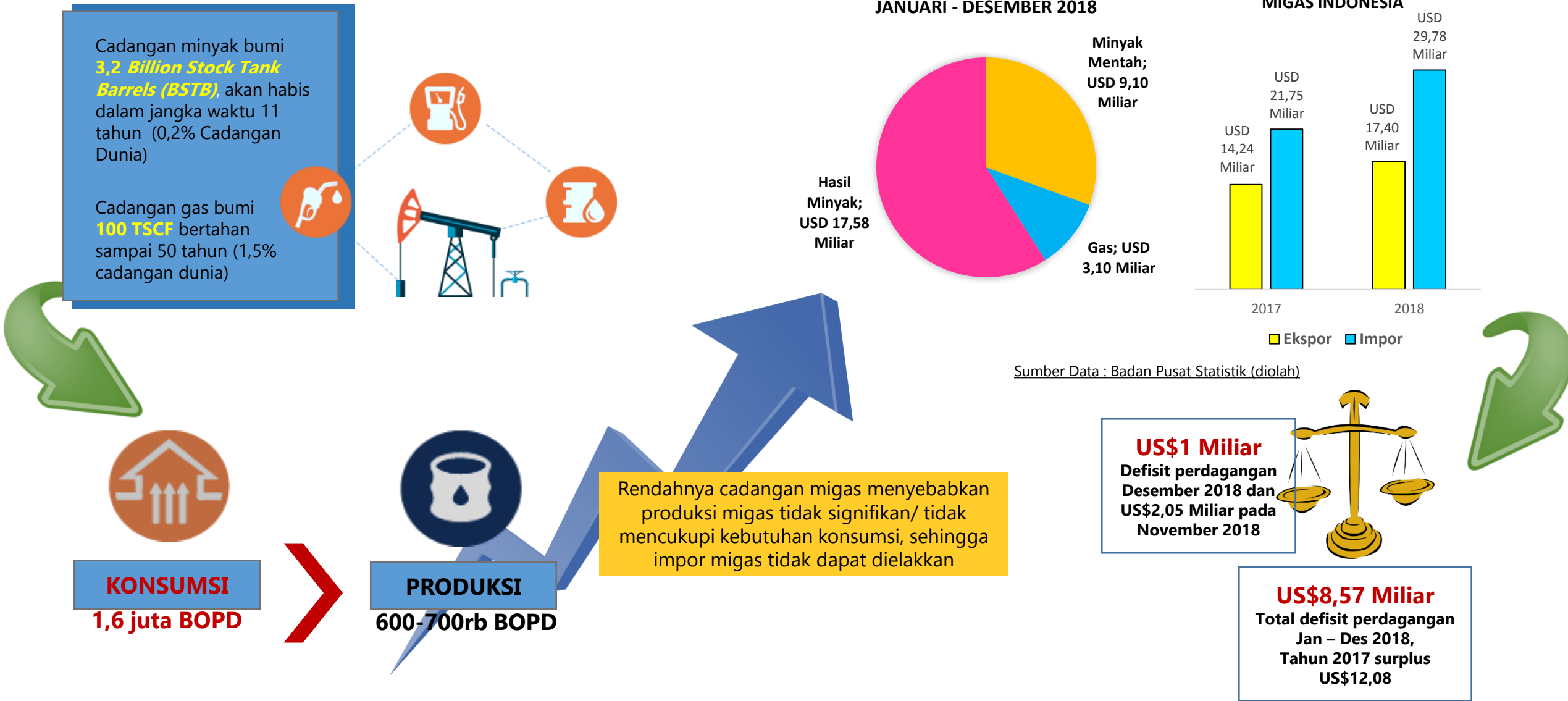


Perubahan UU Migas untuk Mengatasi 4 Isu Pokok Permasalahan Kegiatan Usaha Hulu Migas



ISU 1 : DEFISIT NERACA MIGAS

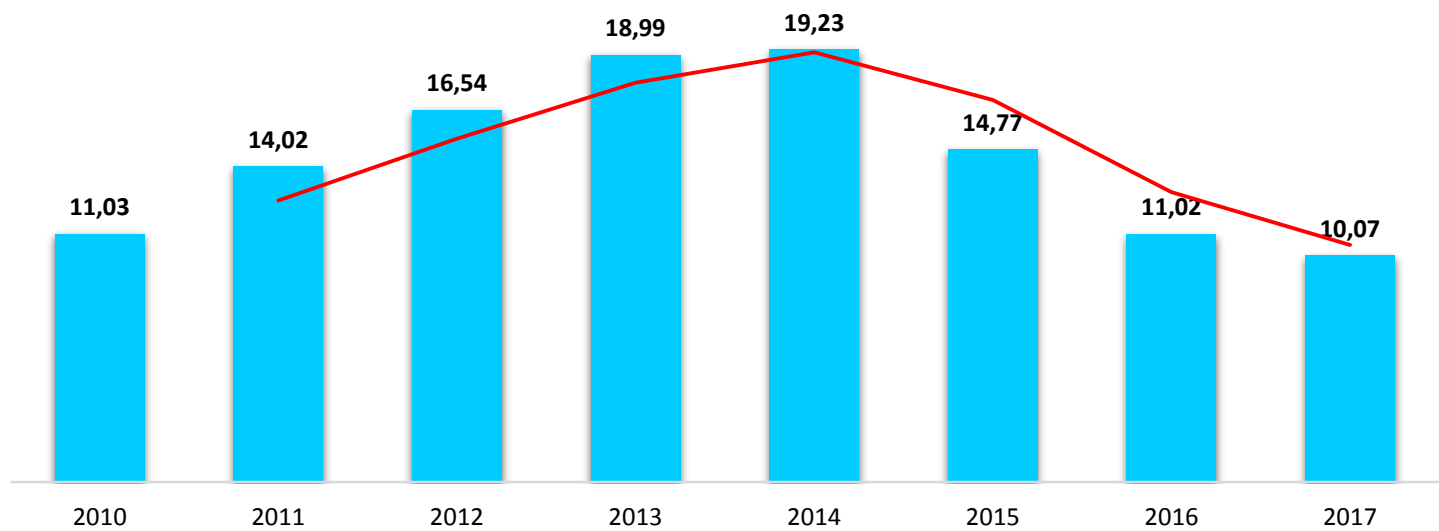
Rendahnya produksi migas mendorong pemenuhan kebutuhan migas nasional melalui impor berdampak pada defisit neraca migas nasional, Januari - Desember 2018 defisit sebesar USD12,38 Miliar → memberikan kontribusi terhadap defisit neraca perdagangan 2018 USD8,57 Miliar



ISU 2 : RENDAHNYA INVESTASI DI SEKTOR HULU MIGAS

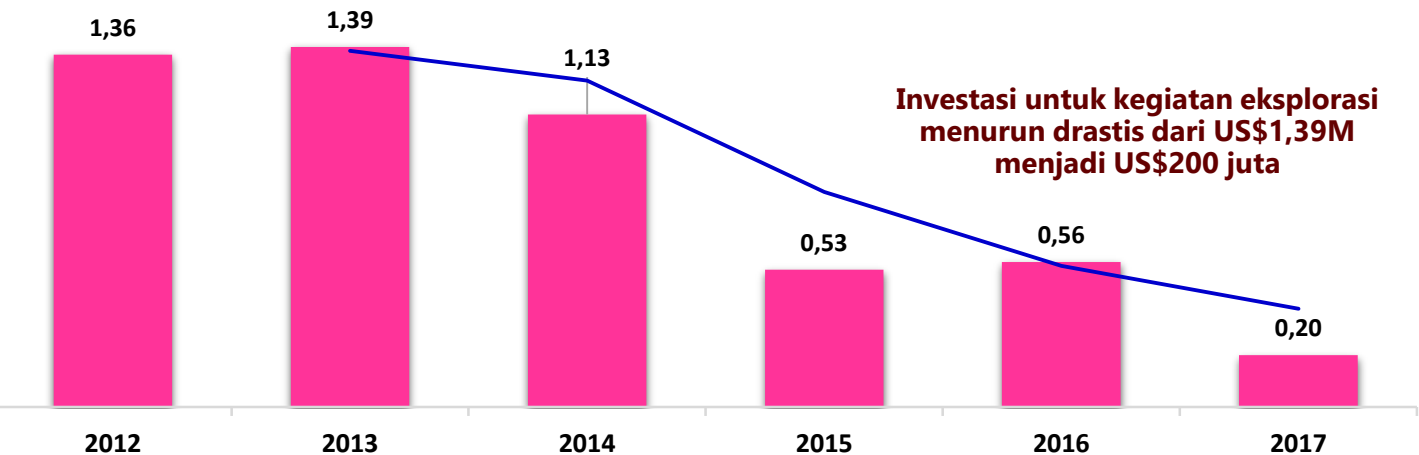
Dalam beberapa tahun terakhir, investasi di sektor migas cenderung menurun mengindikasikan tidak menariknya iklim bisnis migas bagi investor. Pada tahun 2014, investasi migas USD19,23 Miliar turun signifikan pada tahun 2017 menjadi sebesar USD10,7 Miliar. Penurunan nilai investasi sektor hulu migas tersebut berbanding lurus rendahnya investasi untuk kegiatan eksplorasi migas, tahun 2017 hanya USD200 juta.

Realisasi Investasi Sektor Hulu Migas RI (US\$ Miliar)



Sumber Data : SKK Migas

Investasi Hulu Migas Untuk Aktivitas Eksplorasi (US\$ Miliar)



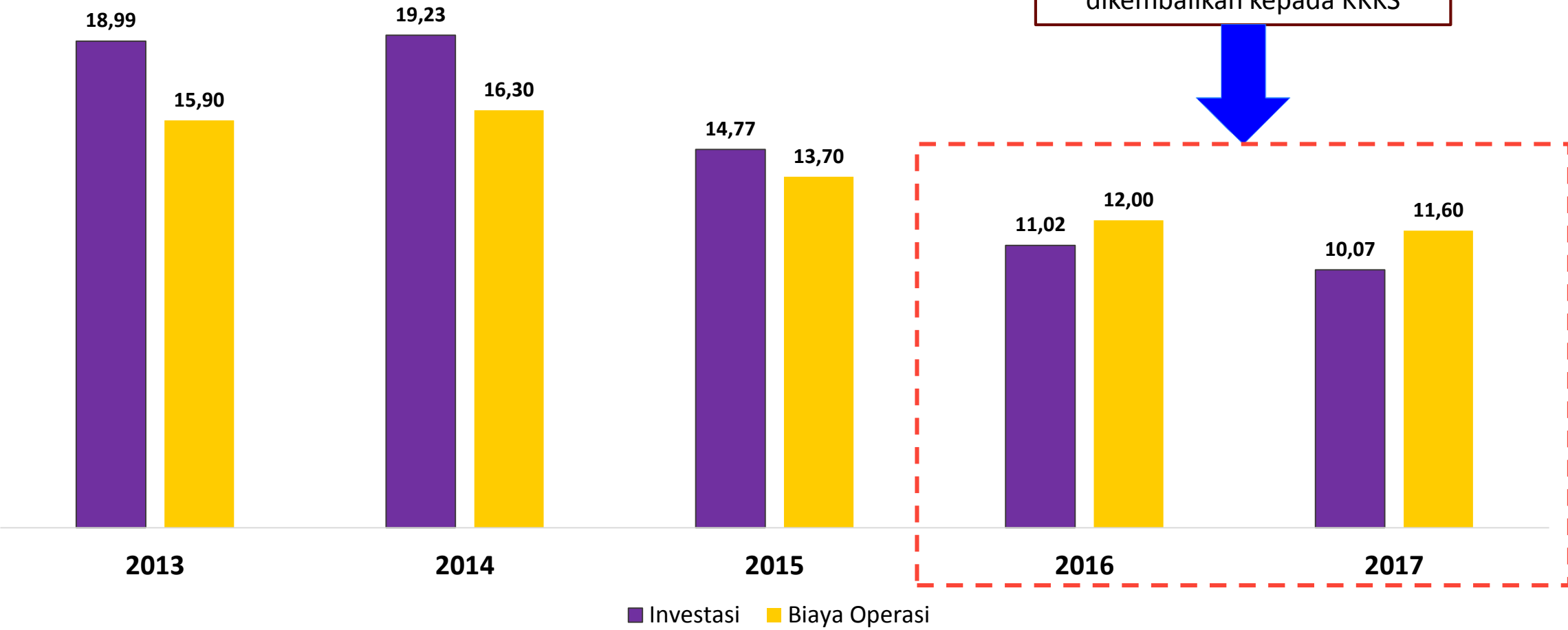
USULAN SOLUSI UNTUK MENINGKATKAN INVESTASI DI SEKTOR MIGAS ANTARA LAIN:

1. Menyusun skema kontrak bagi hasil yang menarik
2. Memberikan insentif fiskal dan non fiskal untuk keekonomian proyek migas
3. Merampingkan proses perijinan
4. Menghapus regulasi yang menghambat investasi
5. Menciptakan kepastian hukum dan keamanan yang kondusif

RENDAHNYA INVESTASI HULU MIGAS vs TINGGINYA PENGEMBALIAN BIAYA OPERASI KEPADA KKKS

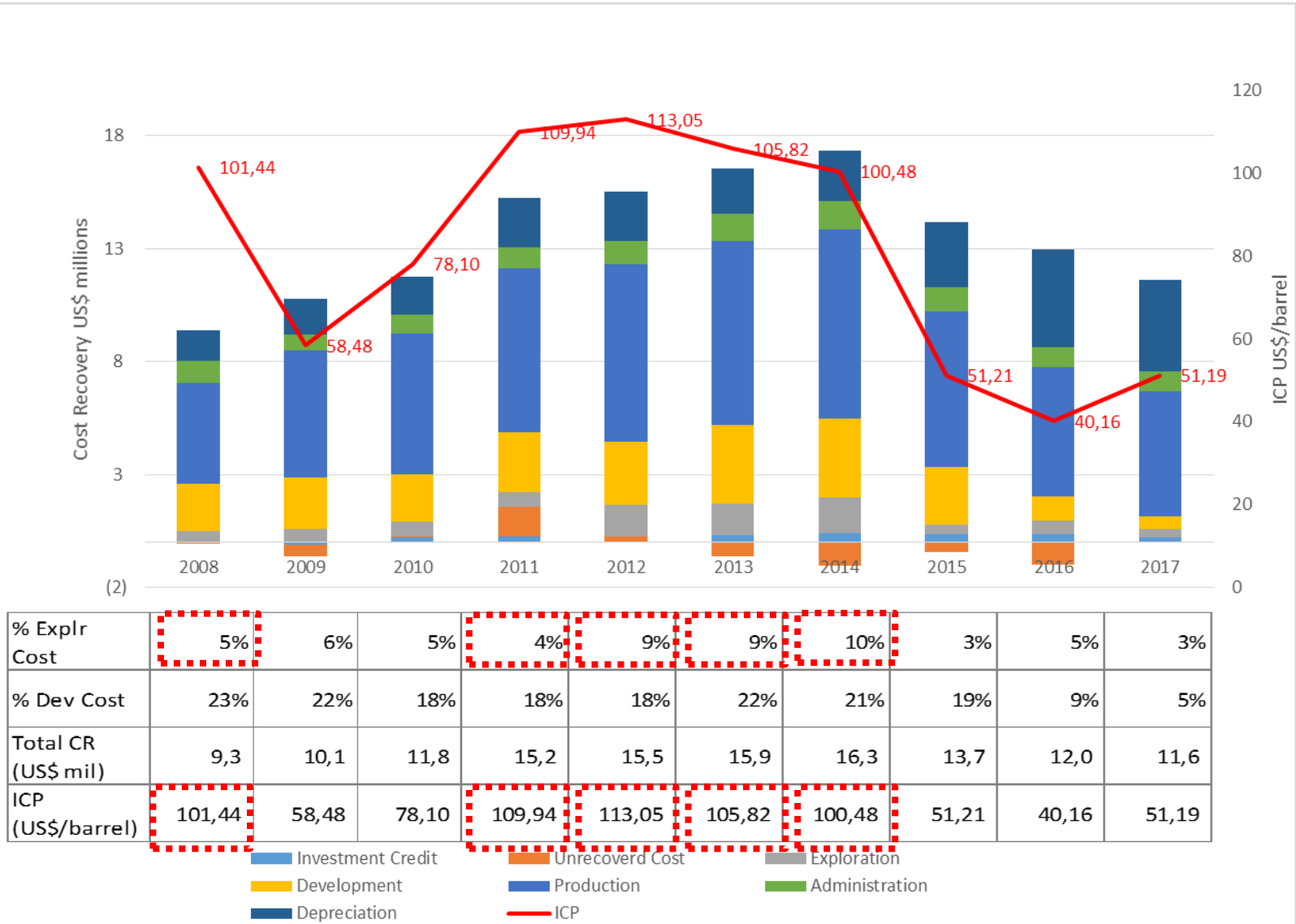
Nilai Investasi di Sektor Migas dalam 5 tahun terakhir (2013-2017) mengalami tren yang menurun, tetapi pengembalian Biaya Operasi kepada KKKS lebih tinggi pada tahun 2016 dan 2017.

Secara *head to head* nilai investasi migas defisit dibandingkan biaya operasi yang dikembalikan kepada KKKS



ISU 3 : BIAYA OPERASI KKKS UNTUK KEGIATAN EKSPLORASI SANGAT RENDAH

Penemuan cadangan migas menjadi sebuah keharusan untuk tujuan *security of supply* migas dan untuk keluar dari tekanan defisit neraca migas, namun *spending* KKKS untuk kegiatan eksplorasi masih rendah rata-rata 6.1% dari total biaya operasi sejak tahun 2008 - 2017, bahkan pada saat harga minyak tinggi (tahun 2011 - 2014) KKKS tidak meningkatkan *spending*-nya untuk kegiatan eksplorasinya

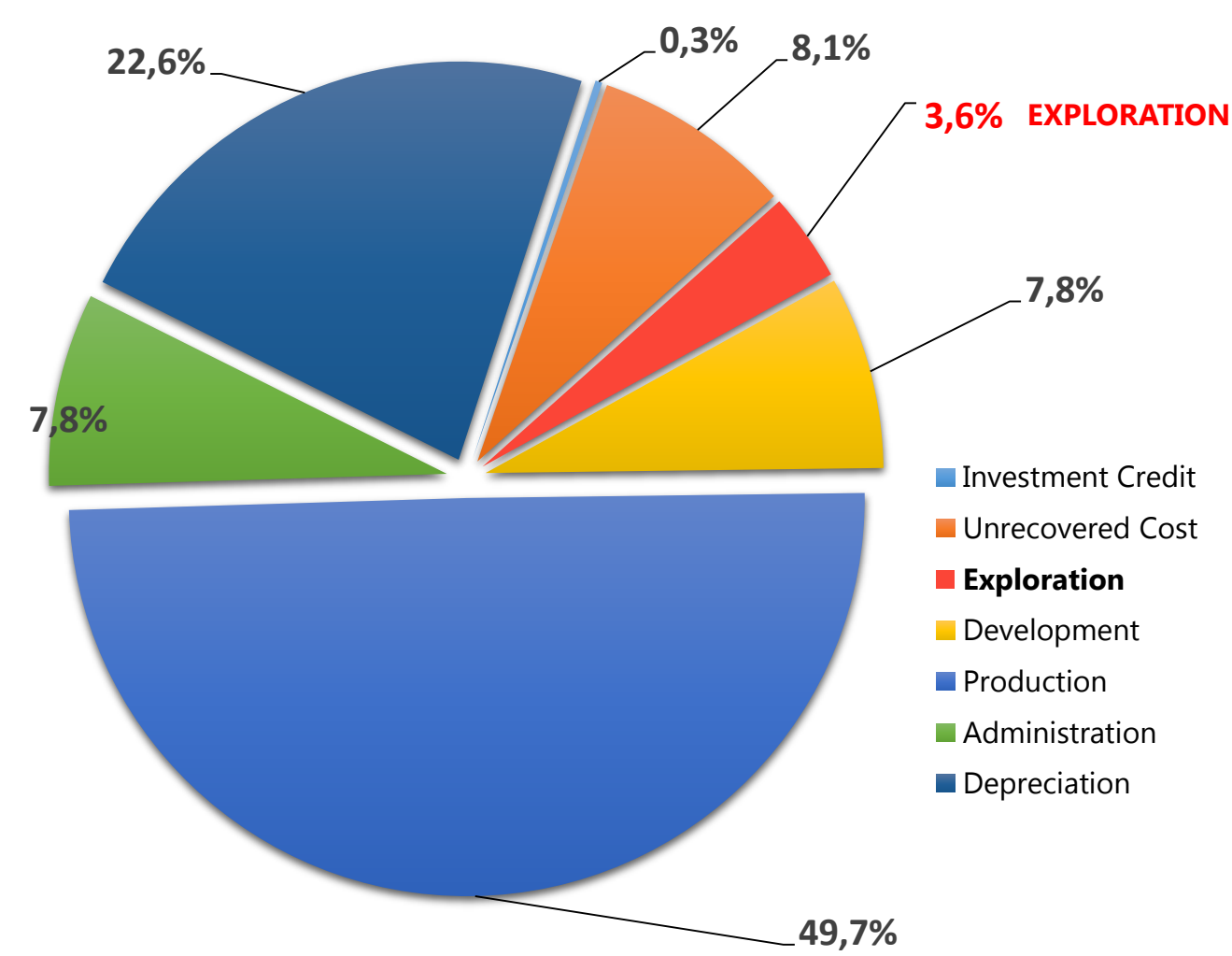


Hipotesis:
KKKS cenderung melakukan kegiatan untuk mempertahankan/memberikan revenue (*return*) daripada melakukan kegiatan eksplorasi yang berisiko tinggi. Kecenderungan ini harus dimitigasi oleh SKK Migas melalui kebijakan yang dapat "memaksa" KKKS melakukan kegiatan eksplorasi secara masif dan berkesinambungan.

- USULAN SOLUSI UNTUK MENINGKATKAN INVESTASI EKSPLORASI ANTARA LAIN:**
1. Membuat kebijakan mandatory spending nilai minimal investasi untuk eksplorasi : dalam persentase terhadap total spending atau nilai minimal absolut
 2. Memberikan reward kepada KKKS yang melakukan investasi eksplorasi diatas nilai mandatory spending : reward dalam bentuk split migas atau insentif fiskal atau bentuk lainnya yang atraktif.

REALISASI CR TAHUN 2018

CR 2018 diperkirakan sebesar US\$11,7 miliar atau lebih besar US\$1,7 miliar dari APBN. Komponen terbesar biaya operasi KKKS untuk kegiatan produksi (49,7%) sedangkan biaya operasi untuk eksplorasi hanya US\$421 juta (3,6%).



Komponen	Outlook Jan-Des 2018	% CR terhadap Total
Investment Credit	33	0,3%
Unrecovered Cost	952	8,1%
Exploration	421	3,6%
Development	918	7,8%
Production	5.836	49,7%
Administration	921	7,8%
Depreciation	2.657	22,6%
Total Cost Recoverable	11.738	100,0%

Sumber:
*) Data SKK Migas per Oktober 2018

ISU 4 : COST RECOVERY (CR) KKKS

Permasalahan Cost Recovery dapat ditinjau dari 2 perspektif : Aspek Kuantitas dan Aspek Kualitas. SKK Migas belum mampu menyelesaikan permasalahan CR secara kuantitas dan belum optimal menjaga kualitas CR.

1

Realisasi CR cenderung lebih tinggi dari target APBN/APBN-P



2

Realisasi CR selalu melampaui targetnya, tetapi realisasi produksi/lifting migas selalu dibawah target



CR KKKS tidak signifikan mendukung kegiatan eksplorasi untuk menemukan cadangan migas baru

3



Temuan kelebihan/ketidakwajaran pengembalian CR kepada KKKS Berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP terdapat temuan sebesar Rp2,6 Triliun

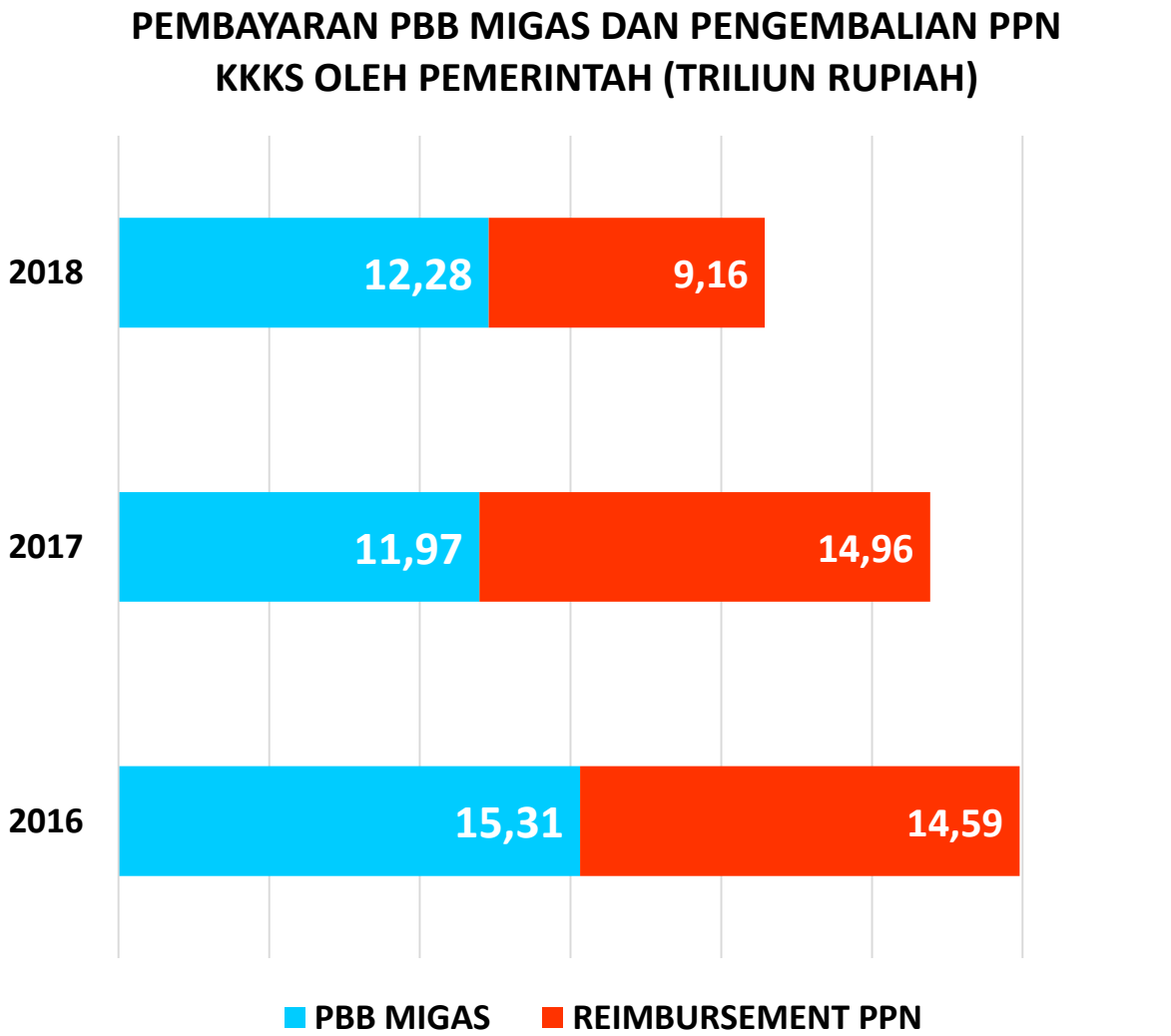
4

Peran Kementerian Keuangan Mendukung Kegiatan Usaha Hulu Migas



PERAN KEMENTERIAN KEUANGAN UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN USAHA HULU MIGAS : INSENTIF FISKAL

Dalam rangka mendukung kegiatan usaha hulu migas, Pemerintah telah membayarkan PBB Migas dan Pengembalian PPN kepada KKKS, sebesar Rp78,27 Triliun dalam kurun waktu 2016 - 2018



No	Insentif	Bentuk Insentif
1.	PP NOMOR 27 TAHUN 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	• Tahap Eksplorasi (Pasal 26A ayat 1 - 4) ❖ Pembebasan Bea Masuk Atas Impor ❖ PPN & PPNBM Tidak Dipungut ❖ PPh Pasal 22 Tidak Dipungut ❖ Pengurangan PBB Migas 100% • Tahap Eksploitasi (Pasal 26B ayat 1 - 4) ❖ Pembebasan Bea Masuk Atas Impor ❖ PPN & PPNBM Tidak Dipungut ❖ PPh Pasal 22 Tidak Dipungut ❖ Pengurangan PBB Migas 100% • Pembebanan biaya operasi fasilitas bersama (Pasal 26C ayat 3) PPN tidak dipungut
2.	PP NOMOR 53 TAHUN 2017 Tentang Perlakuan Perpajakan Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split	Tahap Eksplorasi dan Eksploitasi sampai dengan saat dimulainya produksi komersial (Pasal 25) ❖ Pembebasan Bea Masuk Atas Impor ❖ PPN & PPNBM Tidak Dipungut ❖ PPh Pasal 22 Tidak Dipungut ❖ Pengurangan PBB Migas 100%

kerru sumange' kurrusumanga' mejuah-juah teurimeng geunaseh
obrigado barak tarima kasih sauweghele
terimo kasih matur nuwun mauliate makaseh
tarimo kasi sakalangkong
amanai terima kasih matur suksama
hatur nuhun epanggawang tampiaseh teghimakaseh
teurimong gaseh beh bujur makase

ciwir.blogspot.co.id

